

ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA PAD, DAU, DAK DAN PERAN KAPASITAS FISKAL TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI PERIODE 2021-2025

Sri Wardia¹, Dara Puspita², Alya Zalvi³, Titin Agustin Nengsih⁴

^{1,2,3}Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 36363, Indonesia,

⁴Department of Statistic, Faculty of Science and Technology, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 36363, Indonesia,

e-mail: e-mail: sriwardiah9@gmail.com, daraapus17@gmail.com, alyazalvi11@gmail.com, nengsih@uinJambi.ac.id

ABSTRAK

Belanja Daerah merupakan cermin utama kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan. Besar-kecilnya belanja bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dari pemerintah pusat, dan kapasitas fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2021-2025, serta menguji fenomena *flypaper effect*.

Penelitian menggunakan data sekunder dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Sampel terdiri atas 11 kabupaten/kota dengan 55 observasi data panel. Variabel PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural (Ln), sedangkan KFD menggunakan indeks aslinya. Analisis menggunakan regresi data panel dengan EViews 13. Random Effect Model (REM) dipilih berdasarkan Chow Test dan Hausman Test, kemudian diestimasi menggunakan Panel Estimated Generalized Least Squares (EGLS) dengan koreksi White cross-section.

Hasil penelitian menunjukkan PAD, DAU, DAK, dan KFD secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Koefisien elastisitas DAU dan DAK yang lebih besar dibandingkan PAD mengindikasikan terjadinya *flypaper effect*, yaitu Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer pusat dibandingkan PAD.

Kata Kunci: Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Kapasitas Fiskal Daerah, Belanja Daerah, Data Panel

Article history

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author Publish
by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

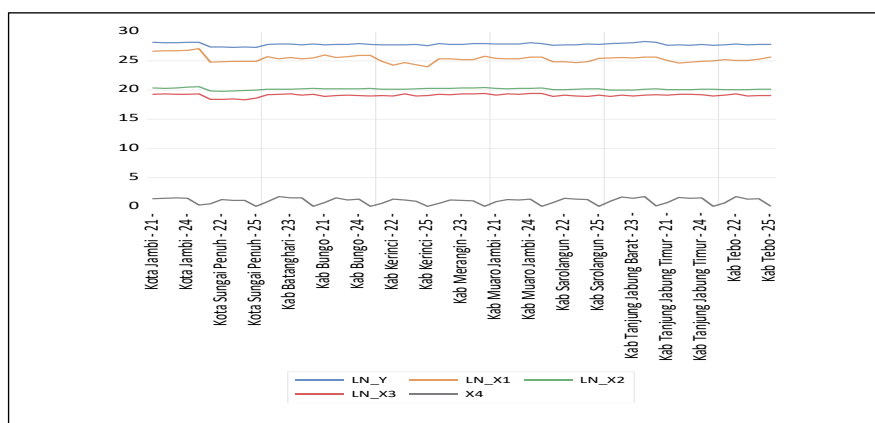
Desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan kewenangan luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan ini bertujuan agar daerah mampu membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara tepat sasaran. Belanja Daerah mencakup seluruh kewajiban pengeluaran daerah dalam

satu tahun anggaran operasi, modal, maupun tidak terduga yang besaran dan strukturnya menjadi indikator ruang fiskal riil dan efektivitas tata kelola keuangan daerah (Herdiyana, 2019).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai Belanja Daerah sangat ditentukan oleh arsitektur dan komposisi pos penerimaan yang dimilikinya, baik yang bersumber dari internal berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah, maupun eksternal berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai instrumen dana perimbangan untuk mereduksi kesenjangan fiskal antarwilayah (*fiscal gap*) sekaligus menjadi stimulus pendanaan kegiatan prioritas nasional di tingkat lokal (Cahyani dkk., 2025). Selama 2021-2025, realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Jambi cenderung fluktuatif dan beberapa daerah bahkan melampaui pagu anggaran tahunannya, mengindikasikan struktur pembiayaan daerah yang masih sensitif dan bergantung pada dana transfer pusat dibandingkan kapasitas pendapatan mandiri.

Fenomena ketimpangan respons anggaran belanja akibat tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana transfer ini dijelaskan secara komprehensif melalui konsep *flypaper effect*. Konsep *flypaper effect* berargumen bahwa pemerintah daerah cenderung bersikap lebih responsif dan meningkatkan belanja daerah ketika sumber dananya berasal dari dana transfer pemerintah pusat (*grant*) dibandingkan ketika sumber dana tersebut bersumber dari peningkatan PAD domestik, meskipun secara teoretis kedua jenis pendapatan tersebut memegang peranan yang setara terhadap ekspansi anggaran belanja (Kusumadewi & Rahman, 2007). Berbagai kajian empiris terdahulu menunjukkan konklusi yang beragam mengenai keberadaan *flypaper effect* ini pada level kabupaten/kota di Indonesia (Melda & Syofyan, 2020; Rafi & Arza, 2023).

Selain PAD dan dana perimbangan, instrumen fundamental lain adalah Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang dirilis berkala oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan (“Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah”), indeks KFD memetakan kemampuan keuangan riil daerah setelah dikurangi belanja pegawai, menggambarkan ruang fiskal (*fiscal space*) untuk mengoptimalkan Belanja Daerah; semakin tinggi indeks KFD, semakin kuat fondasi keuangan daerah untuk berbelanja mandiri. Namun temuan determinan Belanja Daerah dalam literatur masih inkonsisten. Penelitian pada kabupaten/kota di Sulawesi (Armawaddin dkk., 2017) dan di Provinsi Sumatera Selatan (Cahyani et al., 2025) menemukan bukti kuat terjadinya *flypaper effect*, sedangkan studi pada klaster wilayah lain justru menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung pada karakteristik tata kelola anggaran masing-masing daerah.

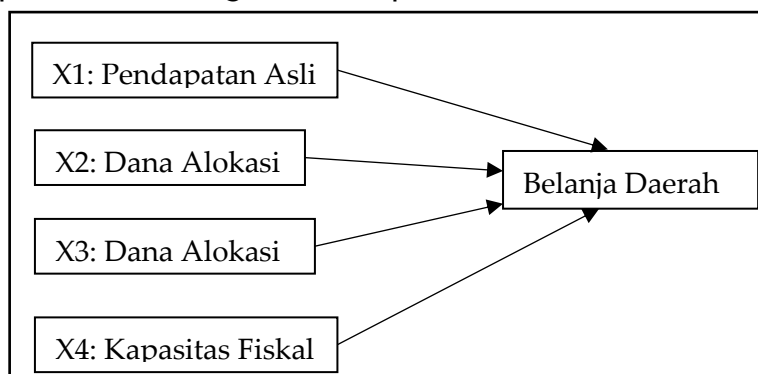


Sumber: Data Sekunder, 2026

Perbedaan dan kesenjangan hasil riset (*research gap*) menegaskan bahwa dinamika fenomena *flypaper effect* serta kontribusi kapasitas fiskal masih perlu diuji ulang pada konteks spasial berbeda, khususnya Provinsi Jambi yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur ekonomi regional. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Kapasitas Fiskal Daerah sebagai variabel tambahan bersama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dalam menganalisis Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2021-2025 yang mencakup seluruh 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai sampel jenuh, serta penempatan KFD sebagai variabel independen tambahan yang diuji bersamaan dengan PAD, DAU, dan DAK dalam satu model estimasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan KFD terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2021-2025, sekaligus membuktikan keberadaan fenomena *flypaper effect* guna menghasilkan rekomendasi kebijakan anggaran yang akurat.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Model penelitian ini menggambarkan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) sebagai variabel independen terhadap Belanja Daerah sebagai variabel dependen pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Kerangka konseptual atau alur pemikiran dari pengembangan hipotesis dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Hubungan antarvariabel tersebut dirumuskan ke dalam hipotesis penelitian yang dikembangkan berdasarkan temuan empiris dari penelitian sebelumnya.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang bersumber langsung dari optimalisasi potensi ekonomi lokal. Semakin tinggi volume PAD yang mampu dihimpun oleh suatu daerah, maka akan semakin besar pula kapasitas fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Perluasan kapasitas fiskal domestik ini memberikan kemandirian yang lebih kuat bagi pembuat kebijakan untuk mendanai pos agregat Belanja Daerah tanpa harus bergantung secara akut pada dana transfer dari pemerintah pusat (Ernayani, 2017)

Secara teoretis, ketersediaan dana mandiri yang memadai memberikan keleluasaan bagi eksekutif dalam mengalokasikan program kerja daerah secara berkelanjutan. Kajian empiris terdahulu yang dilakukan oleh (Armawaddin dkk., 2017; Rafi & Arza, 2023) secara konsisten menemukan bukti bahwa PAD memberikan kontribusi berupa pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap realisasi belanja daerah pada level pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan uraian teoretis dan bukti empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrumen dana transfer pusat yang bersifat hibah umum (*block grant*) dan ditujukan utama untuk memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal antardaerah. Berdasarkan konsep *flypaper effect*, penambahan penerimaan yang bersumber dari DAU cenderung direspons secara lebih besar oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja dibandingkan ketika daerah memperoleh peningkatan dari PAD (Kusumadewi & Rahman, 2007).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa DAU dapat memiliki peran penting dalam pembentukan Belanja Daerah pembiayaan rutin daerah. Publikasi ilmiah terkini oleh (Cahyani dkk., 2025) serta studi empiris mengenai *flypaper effect* dan kapasitas fiskal daerah (Ramadhani dkk., 2025) turut mengonfirmasi keberadaan peran dominan dan elastis dari alokasi DAU terhadap arah kebijakan realisasi belanja daerah, sejalan dengan temuan pada klaster wilayah Pulau Jawa (Apriliani dkk., 2025). Berdasarkan kajian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari dana transfer pemerintah pusat yang bersifat bantuan khusus dengan prasyarat tertentu (*conditional grant*). Dana ini dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan mandat khusus untuk mendanai kegiatan sektoral yang diselenggarakan dengan prioritas pembangunan nasional. Karakteristik pemanfaatan DAK yang bersifat mengikat dan terikat waktu (*earmarked funds*) menyebabkan kucuran dana ini langsung berkontribusi terhadap peningkatan Belanja Daerah pada tahun berjalan.

Daerah yang menerima pagu DAK diwajibkan untuk merealisasikan anggaran tersebut sepenuhnya pada pos belanja yang terkait erat dengan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar publik. Pembuktian empiris mengenai keterikatan linear DAK terhadap ekspansi pengeluaran modal daerah ini diperkuat oleh hasil riset (Liando & Hermanto, 2017). Berdasarkan argumentasi logis tersebut, dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) terhadap Belanja Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) mencerminkan sisa kemampuan keuangan riil suatu daerah untuk mendanai program pembangunan sektoral setelah memperhitungkan dan mengurangi seluruh kebutuhan beban belanja wajib pegawai (gaji PNS/PPPK) serta alokasi wajib lainnya. Ketentuan pemetaan ruang fiskal ini diatur secara resmi berdasarkan (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Ketersediaan ruang fiskal (*fiscal space*) yang memadai memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengeluaran publik yang produktif. Semakin tinggi nilai Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu wilayah, maka semakin

besar pula kemampuan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu wilayah, maka semakin besar pula kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan Belanja Daerah secara optimal, mandiri, dan terbebas dari ancaman defisit likuiditas anggaran (Herdiyana, 2019). Berdasarkan jalinan konsep tersebut, dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan KFD secara Simultan terhadap Belanja Daerah

Secara konseptual ekonometrika, perpaduan komposisi antara PAD, DAU, DAK, dan instrumen kontrol Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) membentuk satu kesatuan arsitektur kapasitas finansial yang utuh. Sinergi dari keempat variabel independen ini secara bersama-sama menentukan seberapa besar batasan kemampuan makro pemerintah daerah untuk mengeksekusi dan merealisasikan belanja daerah dalam satu tahun anggaran berjalan.

Kelayakan model linier berganda ini didasarkan pada asumsi bahwa seluruh komponen penerimaan, baik internal maupun eksternal, akan menggerakkan fungsi alokasi pengeluaran publik secara kolektif. Konfirmasi empiris dari penelitian (Armawaddin et al., 2017; serta Rafi & Arza, 2023) membuktikan bahwa seluruh variasi dari sumber-sumber penerimaan daerah secara simultan (bersama-sama) memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap pergerakan angka belanja daerah. Berdasarkan landasan ini, dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

H5: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Secara yuridis konseptual, pelaksanaan riset anggaran ini didasarkan pada koridor regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sebagai acuan utama reformasi desentralisasi fiskal.

Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling* jenuh (*sensus*) dengan melibatkan seluruh 11 kabupaten/kota sebagai sampel untuk memberikan gambaran keuangan daerah yang lebih komprehensif. Melalui pemanfaatan data panel yang mengintegrasikan 11 unit *cross-section* dan 5 periode *time series* (2021-2025), penelitian ini menghasilkan total 55 observasi.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui publikasi resmi (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, t.t.) data realisasi APBD pada (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, t.t.), serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang diterbitkan secara berkala setiap tahun anggaran terkait (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025).

Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan aplikasi *EViews* 13 dengan metode regresi data panel. Pendekatan regresi data panel ini dipilih karena mampu meningkatkan jumlah observasi, mengurangi masalah heterogenitas data lintas wilayah, serta menghasilkan estimasi yang jauh lebih efisien dibandingkan penggunaan regresi *cross-section* maupun *time series* secara terpisah (Kusumaningtyas dkk., 2022; Nani, 2022)

Variabel Belanja Daerah, PAD, DAU, dan DAK ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln), sedangkan KFD tetap menggunakan nilai indeks aslinya. Model regresi yang digunakan berbentuk model semi-log, dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Ln}_Y = \alpha + \beta_1 \text{Ln}_{X_1it} + \beta_2 \text{Ln}_{X_2it} + \beta_3 \text{Ln}_{X_3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- Ln_Y = Logaritma Natural Belanja Daerah
- α = Konstanta intersep model regresi
- β_1 - β_4 = Koefisien regresi variabel independen
- Ln_{X_1} = Logaritma Natural Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Ln_{X_2} = Logaritma Natural Dana Alokasi Umum (DAU)
- Ln_{X_3} = Logaritma Natural Dana Alokasi Khusus (DAK)
- X_4 = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (tidak dilogaritmakan)
- ε = Error term
- i = Entitas lintas wilayah kabupaten/kota ($i = 1, 2, \dots, 11$)
- t = Periode dimensi waktu tahun pengamatan ($t = 2021, 2022, \dots, 2025$)

Menurut (Kusumaningtyas dkk., 2022), terdapat tiga pendekatan alternatif dalam estimasi regresi data panel, yaitu Chow test, Lagrange Multiplier (LM) test, dan Hausman test. Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model FEM lebih baik daripada model CEM. Tes LM digunakan untuk memilih mana yang lebih baik antara model CEM dan REM. Tes Hausman digunakan untuk menentukan model mana yang lebih baik antara model FEM dan REM.

Setelah menentukan model terbaik, maka Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria estimator yang baik dan tidak bias (Nani, 2022). Perlakuan uji asumsi klasik dalam regresi data panel memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:

- Jika model terbaik yang terpilih adalah Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM), maka seluruh rangkaian uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) wajib dilakukan dan dipenuhi secara mutlak.
- Jika model terbaik yang terpilih adalah Random Effect Model (REM), maka model diestimasi menggunakan pendekatan Generalized Least Squares (GLS). Metode GLS melakukan pembobotan data (*weighting*) untuk mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi secara otomatis melalui metode Panel Estimated Generalized Least Squares (EGLS) dengan mengintegrasikan koreksi kovarians White cross-section (*period cluster*) standard errors & covariance, sehingga model tetap Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) dan robust (Kusumaningtyas dkk., 2022; Nani, 2022).

Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan untuk mengukur tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (Adjusted R-squared).

HASIL PENELITIAN

Pemilihan Model Estimasi Terbaik (Spesifikasi Model Data Panel)

1. Analisis Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.959270	(10,40)	0.0000
Cross-section Chi-square	85.579925	10	0.0000

Sumber: Output E-views 13, 2026

Uji Chow menguji apakah intersep antarwilayah konstan atau spesifik lintas entitas. Hasil olah EViews 13 menunjukkan nilai Cross-section F dan Cross-section Chi-square dengan probabilitas masing-masing 0,0000.

Karena probabilitas jauh lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,0000 < 0,05$), H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga Fixed Effect Model (FEM) lebih layak digunakan dibandingkan Common Effect Model (CEM).

2. Analisis Hasil Uji Hausman

Selanjutnya dilakukan Uji Hausman untuk mengevaluasi korelasi linier antara efek acak (random effects) lintas wilayah dengan variabel independen dalam model.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.327838	4	0.5045

Sumber: Output E-views 13, 2026

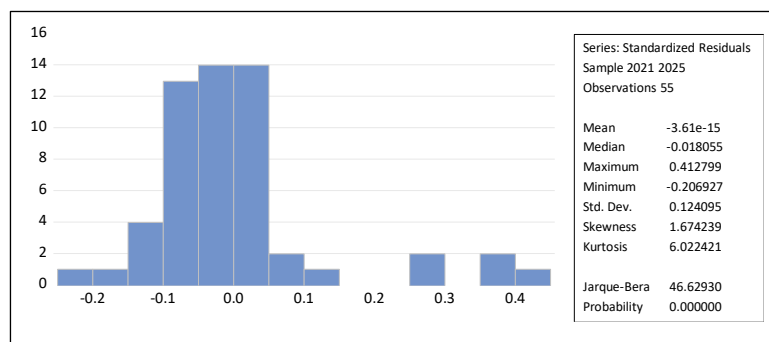
Diperoleh nilai Chi-square Cross-section random dengan probabilitas 0,5045. Karena nilai ini jauh lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0,5045 > 0,05$), H_0 gagal ditolak (diterima).

Kesimpulan Spesifikasi Model Estimasi: Integrasi hasil dari kedua pengujian spesifikasi di atas secara ilmiah menetapkan bahwa berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM)

Hasil Pengujian Asumsi Klasik Data Panel (Random Effect Model)

Karena model terpilih adalah REM, parameter diestimasi menggunakan pendekatan Panel Estimated Generalized Least Squares (EGLS) berbasis pembobotan matriks varians-kovarians. Hasil uji asumsi klasik dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Asumsi Normalitas Residual



Sumber: Output E-views 13, 2026

Hasil uji Jarque-Bera (JB) menghasilkan nilai probability sebesar 0,000000, di bawah $\alpha = 0,05$, yang mengindikasikan residual model belum terdistribusi normal secara formal.

Berdasarkan uji Jarque-Bera, nilai probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari 0,05, sehingga secara formal residual model belum berdistribusi normal. Oleh karena itu, hasil uji normalitas menjadi salah satu catatan dalam interpretasi hasil penelitian dan hasil estimasi tetap sah digunakan sebagai basis kesimpulan kebijakan.

2. Pemenuhan Asumsi Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menguji gejala hubungan linier sempurna antarvariabel penjelas melalui matriks korelasi Pearson.

	LN_X1	LN_X2	LN_X3	X4
LN_X1	1.000000	0.581296	0.367720	0.024486
LN_X2	0.581296	1.000000	0.727551	-0.167929
LN_X3	0.367720	0.727551	1.000000	0.125421
X4	0.024486	-0.167929	0.125421	1.000000

Sumber: Output E-views 13, 2026

Korelasi tertinggi ditemukan antara Ln_X₁ (PAD) dan Ln_X₂ (DAU) sebesar 0,727551, jauh di bawah ambang batas toleransi 0,80 (0,727551 < 0,80), Berdasarkan nilai korelasi antarvariabel independen, tidak ditemukan indikasi multikolinearitas yang kuat dalam model.

3. Pemenuhan Asumsi Heteroskedastisitas dan Autokorelasi

Estimasi REM dijalankan melalui prosedur Panel EGLS (*Cross-section random effects*), yang secara otomatis melakukan pembobotan data (*weighting*) untuk mengeliminasi heteroskedastisitas.

Model ini juga mengintegrasikan koreksi kovarians White cross-section (*period cluster*) standard errors & covariance agar parameter tangguh (*robust*) terhadap dependensi spasial.

White cross-section (period cluster) standard errors & covariance (d.f. corrected)

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank
Standard error and t-statistic probabilities adjusted for clustering

Durbin-Watson stat	1.955914
--------------------	----------

Sumber: Output E-views 13, 2026

Metode White cross-section digunakan untuk memperoleh standard error yang lebih robust terhadap kemungkinan heteroskedastisitas dan dependensi dalam data panel tanpa mengubah koefisien regresi utama, terkonfirmasi dari nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,955914 yang mendekati angka ideal 2 dan berada dalam rentang bebas autokorelasi (1,5 < DW < 2,5).

Hasil Analisis Regresi Utama dan Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil komputasi estimasi data panel memanfaatkan model terbaik Random Effect Model / Panel EGLS (*White cross-section*), maka persamaan struktural regresi linier berganda model semi-log yang terbentuk adalah:

$$\text{Ln}_Y = 7,889097 + 0,109522 \text{Ln}_X1 + 0,651859 \text{Ln}_X2 + 0,207459 \text{Ln}_X3 + 0,075774 X4$$

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t menguji pengaruh individual tiap variabel bebas pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$), dirinci sebagai berikut:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.889097	2.214524	3.562435	0.0235
LN_X1	0.109522	0.024278	4.511208	0.0107
LN_X2	0.651859	0.097256	6.702514	0.0026
LN_X3	0.207459	0.053470	3.879925	0.0178
X4	0.075774	0.013065	5.799956	0.0044

Sumber: Output E-views 13, 2026

- Pengaruh PAD (Ln_X1) terhadap Belanja Daerah (H₁): koefisien 0,109522, probabilitas 0,0107 (< 0,05), sehingga H₁ diterima. PAD berpengaruh positif dan signifikan; setiap kenaikan PAD 1% meningkatkan Belanja Daerah 0,11% (*ceteris paribus*).
- Pengaruh DAU (Ln_X2) terhadap Belanja Daerah (H₂): koefisien 0,651859, probabilitas 0,0026 (< 0,05), sehingga H₂ diterima. DAU berpengaruh positif dan signifikan, menjadi variabel dengan dampak terbesar dalam model; setiap kenaikan DAU 1% menaikkan Belanja Daerah 0,65%.
- Pengaruh DAK (Ln_X3) terhadap Belanja Daerah (H₃): koefisien 0,207459, probabilitas 0,0178 (< 0,05), sehingga H₃ diterima. DAK berpengaruh positif dan signifikan; kenaikan DAK 1% mendorong ekspansi Belanja Daerah 0,21%.
- Pengaruh KFD (X₄) terhadap Belanja Daerah (H₄): koefisien 0,075774, probabilitas 0,0044 (< 0,05), sehingga H₄ diterima. KFD berpengaruh positif dan signifikan; sebagai indeks linier asli, Koefisien KFD sebesar 0,075774 menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan indeks KFD berkaitan dengan peningkatan Ln Belanja Daerah sebesar 0,075774, dengan variabel lain dianggap konstan.

2. Pembuktian Empiris Keberadaan Fenomena Flypaper Effect

Perbandingan tersebut menunjukkan adanya flypaper effect pada struktur APBD kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2021-2025, karena respons Belanja Daerah terhadap dana transfer lebih besar dibandingkan terhadap PAD.

Seluruh variabel signifikan secara statistik, dengan koefisien elastisitas DAU ($\beta_2 = 0,651859$) dan DAK ($\beta_3 = 0,207459$) jauh lebih besar dibandingkan PAD ($\beta_1 = 0,109522$).

Perbandingan ini membuktikan Hipotesis Kelima (H₅) diterima: *flypaper effect* terbukti terjadi pada struktur APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2021-2025, hal ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah memiliki respons yang lebih besar terhadap dana transfer dibandingkan terhadap PAD.

3. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

R-squared	0.533630
Adjusted R-squared	0.496320
S.E. of regression	0.061498
F-statistic	14.30273
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output E-views 13, 2026

Uji statistik F menilai kelayakan model serta pengaruh simultan seluruh variabel independen. Diperoleh nilai F-statistic sebesar 14,30273 dengan Prob(F-statistic) sebesar 0,000000.

Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 ($0,000000 < 0,05$), PAD, DAU, DAK, dan KFD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di

4. Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Kebaikan suai (*goodness of fit*) model diukur dari nilai Adjusted R-squared sebesar 0,496320, mengindikasikan PAD, DAU, DAK, dan KFD secara kolektif menjelaskan variasi Belanja Daerah sebesar 49,63 %.

Sisanya sebesar 50,37 % dijelaskan oleh faktor eksternal di luar model, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), SiLPA tahun sebelumnya, dana hibah tidak mengikat, dan dinamika politik anggaran lokal.

PEMBAHASAN

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Hasil estimasi Random Effect Model (REM) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dengan koefisien elastisitas 0,109522, sejalan dengan *Public Choice Theory* bahwa optimalisasi pajak dan retribusi daerah memperluas ruang fiskal (*fiscal space*) sehingga meningkatkan kapasitas belanja operasi maupun belanja modal (Ernayani, 2017; Kusumadewi & Rahman, 2007).

Namun koefisien yang relatif kecil ini menunjukkan kontribusi PAD sebagai penggerak belanja publik di Provinsi Jambi masih rendah, mencerminkan basis ekonomi daerah yang bertumpu pada komoditas primer (sawit dan karet) dengan harga fluktuatif, sehingga penerimaan mandiri belum terakselerasi (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR Republik Indonesia, 2023).

Konsensus temuan ini memperkuat jalinan riset empiris dari (Rafi & Arza, 2023) yang menyimpulkan bahwa PAD secara konsisten memiliki dampak positif searah terhadap belanja publik, namun daya dorongnya cenderung lemah dan kalah dominan jika disandingkan dengan komponen pendanaan eksternal.

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dengan koefisien elastisitas 0,651859, menjadikannya determinan dominan dalam model. Tingginya koefisien ini mencerminkan Tingginya koefisien ini menunjukkan tingginya peran DAU dalam pembentukan Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai penopang utama belanja rutin bersifat kaku (*rigid expenditures*), terutama gaji dan tunjangan PNS/PPPK serta operasional birokrasi (Inayati & Setiawan, 2018; Rafi & Arza, 2023).

Meskipun 2021-2025 terjadi transisi regulasi fiskal berdasarkan perubahan kebijakan transfer antar pemerintah dapat memengaruhi pola pengalokasian DAU dan Belanja Daerah, perilaku penganggaran daerah di Provinsi Jambi tetap menunjukkan tingginya peran DAU dalam pembentukan Belanja Daerah: kepastian pagu DAU langsung direspons dengan memperbesar plafon Belanja Daerah (Kustianingsih dkk., 2022).

Keterikatan elastis antara DAU dan belanja daerah sejalan dengan kerangka ilusi fiskal, di mana ketersediaan dana bantuan menurunkan tekanan pemungutan pajak lokal tanpa beban politik (Kusumadewi & Rahman, 2007). Hasil pengujian statistik t ini memberikan konfirmasi empiris yang searah dengan studi dari (Cahyani dkk., 2025) yang menegaskan bahwa fungsi pokok alokasi DAU di tingkat kabupaten/kota di Indonesia masih mendominasi arah kebijakan ekspansi anggaran pengeluaran serta menjadi determinan utama penggerak realisasi belanja sektor publik di daerah.

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah

Variabel DAK menghasilkan koefisien regresi 0,207459 dengan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Temuan ini logis karena DAK bersifat bantuan khusus bersyarat (*conditional matching grant*) yang penggunaannya diikat petunjuk teknis kementerian sektoral (*earmarked funds*) untuk mendanai kegiatan selaras prioritas pembangunan nasional (Cahyani dkk., 2025; Rafi & Arza, 2023)

Di Provinsi Jambi, karakteristik DAK yang penggunaannya diarahkan pada bidang atau kegiatan tertentu dapat memperkuat pengaruhnya terhadap Belanja Daerah, karena daerah tidak memiliki diskresi untuk merealokasikannya ke pos lain (Liando & Hermanto, 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar di daerah masih memiliki keterkaitan dengan kebijakan alokasi dana eksternal, memperkuat temuan (Fachruzzaman dkk., 2015) serta (Nailufar & Sufitrayati, 2019) yang mengonfirmasi bahwa instrumen transfer bersyarat seperti DAK memegang peranan krusial dan memberikan dampak searah yang signifikan terhadap perluasan volume belanja sektor publik dan belanja pembangunan di tingkat daerah.

Analisis Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Terhadap Belanja Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dengan koefisien 0,075774, memvalidasi bahwa Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) yang dipublikasikan (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2024) efektif menggambarkan ruang fiskal (*fiscal space*) riil yang dikuasai daerah (Armawaddin dkk., 2017; Herdiyana, 2019)

Kabupaten/kota dengan indeks KFD tinggi seperti Kota Jambi sebagai pusat ekonomi jasa atau Tanjung Jabung Barat yang ditopang bagi hasil migas memiliki keleluasaan lebih besar untuk mengeksekusi program belanja strategis di luar beban pegawai, menjadi bantalan likuiditas terhadap risiko defisit anggaran (Herdiyana, 2019; Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Sebaliknya, daerah dengan indeks KFD rendah memiliki postur anggaran tidak fleksibel karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk belanja wajib pegawai. Hasil ini membuktikan integrasi KFD ke dalam model mampu menetralisasi bias heterogenitas keuangan antarwilayah (Herdiyana, 2019). Temuan ini mendukung argumen dari (Cahyani dkk., 2025) bahwa peta kapasitas fiskal merupakan parameter instrumen fundamental yang berkorelasi linear terhadap kapasitas dan daya serap daerah dalam mengoptimalkan realisasi Belanja Daerah.

Pembuktian Empiris dan Implikasi Analisis Fenomena Flypaper Effect

Temuan paling krusial dan menjadi nilai jual utama (*novelty*) dalam penelitian ini adalah terbuktinya fenomena *flypaper effect* pada tata kelola keuangan sektor publik Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2021-2025, ditunjukkan oleh koefisien elastisitas DAU (0,651859) dan DAK (0,207459) yang jauh lebih besar dibandingkan PAD (0,109522).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien DAU dan DAK lebih besar dibandingkan koefisien PAD. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah memiliki respons yang lebih besar terhadap dana transfer dibandingkan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2021-2025. Temuan ini menunjukkan bahwa dana transfer pemerintah pusat memiliki peran penting dalam pembentukan Belanja Daerah selama periode penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian data panel dengan Random Effect Model (REM) dan Panel EGLS terintegrasi koreksi White cross-section, kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2021-2025 menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan KFD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Kombinasi keempat variabel ini memiliki kelayakan model (*goodness of fit*) sebesar 49,63 %, sedangkan sisanya dipengaruhi komponen eksternal seperti Dana Bagi Hasil dan SiLPA.

Secara parsial (uji t), keempat variabel terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada taraf signifikansi 5%. Peningkatan PAD, DAU, DAK, maupun indeks KFD secara individual memicu perluasan Belanja Daerah. Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, yang menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mendukung Belanja Daerah.

Temuan penelitian menunjukkan adanya *flypaper effect* pada struktur APBD kabupaten/kota di Provinsi Jambi, yang ditunjukkan oleh koefisien DAU (0,651859) dan DAK (0,207459) yang lebih besar dibandingkan koefisien PAD (0,109522). Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah memiliki respons yang lebih besar terhadap dana transfer dibandingkan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 2021-2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, D. M., Fitrijanti, T., & Aryana, K. P. (2025). Flypaper Effect Di Pulau Jawa : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Transfer Ke Daerah Terhadap Belanja Daerah Dengan Moderasi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(5), 2518-2537. <https://www.researchgate.net/publication/395959397>
- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77-91. <https://doi.org/10.21002/jepi.2018.05>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (t.t.). *Publikasi Statistik Daerah Provinsi Jambi*. <https://jambi.bps.go.id/>
- Cahyani, V. M., Firmansyah, & Dwitayanti, Y. (2025). Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022. *Jurnal Maneksi*, VOL 14(01), 170-176. <https://doi.org/10.31959/jm.v14i1.2815>
- Dewi, S. R. (2017). Flypaper Effect , PAD , DAU , DAK Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten / Kota Di Indonesia. *JAS: Journal Of Accounting Sceience*, 1(2), 155-174. <https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. (t.t.). *Portal Data APBD Kabupaten/Kota*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan)*, 1(1), 43-52. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>
- Fachruzzaman, Suranta, E., & Martini, E. (2015). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Fairness*, 5(3), 123-138. <https://doi.org/10.33369/fairness.v5i3.15310>
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *JEA: Jurnal Ekplorasi Akutansi*, 2(3), 3144-3159. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.273>
- Herdiyana, D. (2019). Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 112-133. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.610>

- Inayati, N. I., & Setiawan, D. (2018). Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 1(2), 220-239. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i2.2062>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/176576/pmk-no-116pmk072021>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234093/pmk-no-193pmk072022>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/268292/pmk-no-84-tahun-2023>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/305647/pmk-no-65-tahun-2024>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2025 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/341652/pmk-no-97-tahun-2025>
- Kustianingsih, N., Andriana, & Wardhaningrum, O. A. (2022). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Timur. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 58-70. <https://doi.org/https://doi.org/10.37403/financial.v8i1.372>
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akutansi dan Auditing Indonesia*, 11(1), 67-80. <https://doi.org/10.33059/jse.v6i02.5976>
- Kusumaningtyas, E., Sugiyanto, Subagyo, E., Adinugroho, W. C., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). Konsep dan Praktek Ekonometrika Menggunakan EvIEWS. In *Academia Publication*. Academia Publication.
- Liando, I. I., & Hermanto, S. B. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi*, 6(6), 1-22. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1234>
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis Flypaper Effectpada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *JEA: Jurnal Ekplorasi Akutansi*, 2(2), 2826-2838. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.252>
- Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019). Pengaruh PAD dan DAK terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 83-103. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jseb/article/view/1126>
- Nani. (2022). Step by Step Analisis Regresi Data Panel Menggunakan EvIEWS. In *Visi Intelegensia: Vol. Vol. 1*. [https://repository.uinbanten.ac.id/11748/1/E-Book Data Panel EvIEWS.pdf](https://repository.uinbanten.ac.id/11748/1/E-Book%20Data%20Panel%20EvIEWS.pdf)
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR Republik Indonesia. (2023). *Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Pembiayaan Kreatif*. <https://www.dpr.go.id/>
- Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera . *Jurnal Eksplorasi Akutansi (JEA)*, 5(1), 411-427. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.649>
- Ramadhani, M. W., Utami, S., Majiding, N. C., & Akib, A. (2025). Flypaper Effect dan Kapasitas Fiskal Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. *Jurnal Liabilitas: Jurnal Ilmiah Akutansi dan Ekonomi*, 10(2), 121-130. <https://www.researchgate.net/publication/394605167>

- Ruth Pranadipta, & Natsir, K. (2023). Financial, Non-Financial, and Macro-Economic Factors That Affect the First Day Profit Rate When Conducting Initial Public Offering. *International Journal of Application on Economics and Business (IJAEB)*, 1(2), 276-289. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i2.276-289>
- Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 111-130. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun. (2022). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195680/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. (2014). *Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>